

KESENJANGAN AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIIONAL DI INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Ekonomi Islam (S.E) Jurusan Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh

FIFIT KUSMA SARI

NIM: 90100116055

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fifit Kusma Sari
NIM : 90100116059
Tempat/Tgl. Lahir : Benteng Selayar , 13, Aguatus , 1998
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Samata-Gowa
Judul : Kesenjangan Akad Dalam Asuransi Syariah Dan Konvensional Di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh akan batal demi hukum.

Gowa, November 2020

Penyusun,



Fifit Kusma Sari
NIM. 90100116055



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ☎ 424835, Fax 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kesenjangan akad dalam asuransi syariah dan konvensional Di Indonesia”, yang disusun oleh Fifi Kusma Sari, NIM: 90100116055, Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munasqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.


Samata-Gowa, November 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Akramunnas, SE, MM.	(.....)
Penguji I	: Dr. Amiruddin K, M.El.	(.....)
Penguji II	: Ahmad Effendi, SE., M.M.	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Abustanillvas,
M.Ag NIP. 1966130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah ia berikan kepada penulis. Salawat serta Salam penulis haturkan atas junjungan kami Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wassalam yang telah memberikan pedoman hidup berupa Al-qur'an dan As-Sunnah untuk keselamatan hidup umat manusia, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang yang senantiasa Istiqamah di dalamnya.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Kesenjangan Akad Asuransi Syariah Di Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar..

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan.

Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orangtua penulis, **Ayahanda Tercinta Ahmad Saleh** dan **Ibunda Murniati** atas doa yang tidak pernah putus, pengertian kasih sayang dan pengorbanan, keikhlasan mencurahkan perhatian, membimbing dan mendidik serta menasehati penulis dari kecil hingga dewasa dan tidak lupa pula penulis

mengucapkan terimakasih kepada saudara tercinta saya **Devi Kumala Sari, Fitra Kusuma Wandu Dan Putra Kusuma Wandu** yang telah memberi pelajaran hidup yang berharga serta dukungan berupa semangat hingga tercapainya keberhasilan.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahanhati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhanis, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri lauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Ahmad Efendi SE, M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Akramunas, SE, MM selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas. M.Ag, Bapak Akramunas, SE, MM selaku pembimbing yang telah mendidik, memberikan arahan, nasehat dan motivasi untuk demi kemajuan skripsi.
6. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf akademik dan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Alauddin Makassar beserta staf jurusan

Ekonomi Islam, terimakasih atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan.

8. Para sahabat saya Nur Isna, Sukriani dan Suharti yang telah mendampingi saya dalam suka maupun duka, memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman jurusan Ekonomi Islam angkatan 2016 khususnya teman-teman Ekonomi Islam B yang menemani penulis selama 7 semester.
10. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu penyusun menerima kritikan dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya. *Amin Ya Rabbal Alamin*

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Dan Deskripsi Fokus.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II PRINSIP AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Akad.....	14
B. Jenis-Jenis Akad Dalam Asuransi Syariah	19
C. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	22

BAB III PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL

A. Asuransi Syariah.....	30
B. Asuransi Konvensional.....	41
C. Perbedaan Asuransi Syariah Dan Konvensional.....	47

**BAB IV PEMBERLAKUAN AKAD ASURANSI SYARIAH DAN
KONVENSIONAL DI INDONESIA**

- A. Pemberlakuan Akad Tabarru Dalam Asuransi Syariah.....53
- B. Pemberlakuan Akad Tijarah Dalam Asuransi Syariah.....58
- C. Pandangan Ulama Tentang Asuransi Syariah.....62

BAB V PENUTUP

- A. Saran.....65
- B. Kesimpulan.....65

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Nama : Fifit Kusma Sari

Nim : 90100116055

Judul skripsi : Kesenjangan Dalam Akad Asuransi Syariah dan Konvensional di Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akad dalam asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan konvensional, serta mengetahui pemberlakuan akad apa saja yang terjadi dalam asuransi syariah.

Karya tulis ilmiah ini merupakan studi pustaka. Sumber data yang digunakan ada dua, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Adapun referensi dalam karya tulis ilmiah ini diambil dari buku-buku dan jurnal-jurnal tentang asuransi syariah dan konvensional. Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis.

Hasil dari pengkajian karya tulis ilmiah ini menunjukkan bahwa Pemberlakuan akad dalam asuransi syariah di Indonesia didalamnya terdapat dua akad yaitu tabarru' dan tijarah. Akad tabarru' digunakan dengan tujuan untuk kebajikan (tolong-menolong). Sedangkan akad tijarah digunakan dengan tujuan komersial (mendapatkan keuntungan). Dalam akad tijarah terdapat akad mudharabah. Transaksi mudharabah yang berlangsung di beberapa lembaga asuransi syariah adalah status ganda yang pada satu sisi menempatkan dirinya sebagai pelaku usaha (mudharib) dan pada sisi lain sebagai pemilik modal (sahibul-mal). Padahal secara riil sejatinya asuransi syariah tidak memiliki modal, sebab modal yang diklaim sebagai milik modal itu sesungguhnya milik nasabah yang disimpan.

Kata Kunci: Kesenjangan, Akad, Asuransi Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hidup manusia pada zaman moderen ini sudah semakin kompleks. Kebutuhan manusia yang dahulu hanya bersifat material, sekarang manusia memerlukan pengamanan terhadap jiwa, keturunan, dan harta mereka, karena semakin maju kebudayaan manusia semakin kompleks persoalan yang mereka hadapi. Salah satu perkembangan kehidupan manusia untuk menjaga keamanan jiwa adalah asuransi.¹

Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Maidah 5/2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong diantara mereka, tolong menolong yang

¹Abdul Rauf, "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*1 no. 2 (2010): h. 141.

² Kemnterian Agama Reublik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:syamil Qur'an, 2010) h.106

dimaksud adalah tolong menolong dalam berbuat kebaikan bukan tolong menolong dalam hal berbuat dosa yakni bermaksiat kepada Allah swt.

Asuransi memegang peranan penting, karena memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, seperti kerugian harta, jiwa, dan lain sebagainya. Asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Asuransi juga menjadi bagian yang penting dari perusahaan. Misalnya Investment banker akan merasa lebih yakin terhadap proyek-proyek tertentu apabila semua risiko proyek itu telah dilindungi oleh asuransi.³

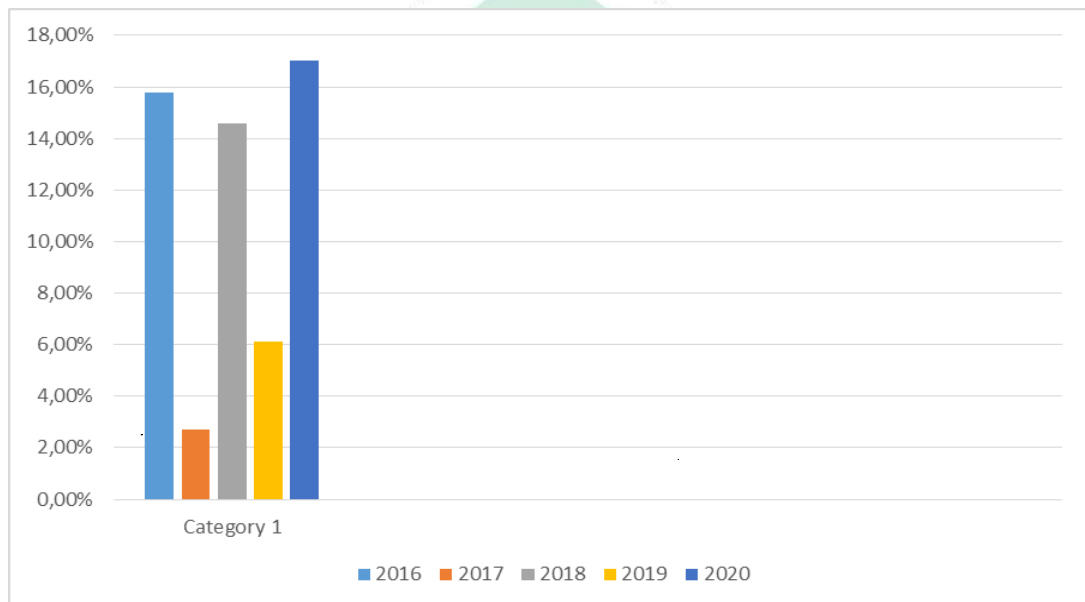
Asuransi dapat didefinisikan dalam berbagai perspektif. Dalam perspektif ekonomi, asuransi adalah suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidak pastian akan adanya kerugian keuangan (*finansial*). Asuransi dalam perspektif hukum, merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang terjadi yang dipertanggung jawabkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Menurut perspektif lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi.⁴

³Sunarmi, "Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum* 3 no. 1 (2015): h. 5.

⁴Fuad Thohari, "Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah", *Al-Iqtishad* 3 No.2 (2011): h. 274.

Perusahaan Asuransi di Indonesia setiap tahun terus meningkat, pada tahun 2012 ada sekitar 140 perusahaan asuransi, dan tahun 2016 meningkat menjadi 146. Pertumbuhan asuransi juga meningkat dari tahun 2016 sebesar 15,8% di tahun 2020 menjadi 17%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari garfik berikut.⁵

Tabel 1.1 Pertumbuhan Asuransi Di Indonesia



Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan asuransi dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan, meski dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 pertumbuhan asuransi mencapai 15,8%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun menjadi 2,7%, tahun 2018 kembali mengalami kenaikan

⁵Kurnia Sari, "Perkembangan Asuransi Kesehatan Swasta di Indonesia Tahun 2012-2016", *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia* 2 No, 2 (2016): h. 48.

yaitu sebesar 14,6%, kemudian tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 6,1%, baru pada tahun 2020 asuransi tumbuh kembali sebesar 17%.

Asuransi yang berkembang pesat di Indonesia membuat kebutuhan akan pengadaan asuransi adalah sesuatu yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Keadaan itulah yang memunculkan berbagai perbedaan pendapat di berbagai kalangan sehingga memunculkan fatwa ulama MUI yang mempertanyakan keabsahan dan kesesuaian asuransi dengan prinsip Islam.⁶

Salah satu bentuk asuransi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam ialah semua asuransi menginvestasikan dananya dengan bentuk bunga, yang berarti melibatkan riba di dalamnya. Kemudian pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu, hal ini termasuk ke dalam *maysir*. Sedangkan indikasi *gharar* yang terjadi pada asuransi konvensional ialah tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung.⁷

Keraguan MUI terhadap asuransi menyebabkan lembaga keuangan Islam membentuk asuransi yang dinamakan dengan asuransi syariah. Asuransi syariah tumbuh dan berkembang sesuai dengan tumbuhnya perbankan syariah di

⁶Husni Mubarrak, "Kontroversi Asuransi di Indonesia:Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs), *Jurnal Peradaban Islam*12 no.1 (2016): h. 35.

⁷Arif Efendi, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)", *Wahana Akademika*3 No. 2 (2016): h. 73.

Indonesia.⁸ Asuransi syariah pun kemudian mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Menurut laporan dari Baappepam-LK asuransi meningkat dari 31.94% menjadi 33.76%.⁹

Meskipun asuransi Syariah mengalami perkembangan yang pesat, namun masih terjadi perdebatan hukum asuransi di antara para ahli fikih. Mulai pertama dikaji sampai saat ini tidak pernah berhenti, satu pihak mengatakan boleh dan pihak yang lain melarangnya. Perdebatan panjang itu juga melebar kepada status hukum asuransi syariah, bahkan di Indonesia bagi sebagian kalangan baik asuransi konvensional maupun asuransi islam hukumnya haram.¹⁰

Akad dalam asuransi Syariah juga sering memicu perbedaan pendapat dari para hukum Islam. Dalam Fatwa DSN MUI tentang Asuransi Syariah, konsep tujuan akad asuransi syariah yang menjadi dasar pembentukan akad baru asuransi syariah belum nampak. Konsep dasar asuransi yang menjadi pengalihan resiko dari tertanggung ke penanggung dengan imbalan premi dianggap sebagian ulama telah menyalahi syariat. Sebagai gantinya dibentuklah Akad-akad yang dianggap sesuai syariat. Namun pembentukan akad-akad tersebut menjadi permasalahan baru

⁸Novi Puspitasari, “ Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaanya dengan Asuransi Konvensional”, *Jeam*10 no. 1 (2011): h. 35.

⁹ Eja Armaz Hardi, ” Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*3 no 2 (2015): h. 424.

¹⁰ Muhamad Nadratuzzaman Hosen, “Mendudukan status hukum asuransi syariah dalam tinjauan fuqaha kontemporer”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*13no. 2 (2013): h. 213.

karena akad-akad tersebut sudah mempunyai tujuan akad sendiri-sendiri dan tidak mungkin dijadikan tujuan asuransi.¹¹

Selain itu praktik asuransi syariah tidak pernah terlepas dari kritikan masyarakat. Banyak yang mengaggap dan menyimpulkan bahwa praktik asuransi syariah sama saja dengan konvensional. Lebih jauh mereka mengaggap bahwa asuransi syariah hanyalah instansi konvensional yang menggunakan bahasa arab untuk mengidentifikasi produknya. Kritikan masyarakat juga tidak terlepas dari praktik akad yang terutama penggunaan akad *mudharabah* dari asuransi syariah itu sendiri. Sehingga sering terjadi sengketa pada kedudukan akad *mudharabah* yang digunakan dalam asuransi syariah terhadap syariat Islam.¹²

Masalah pada produk yang mengandung dana investasi yang ada pada asuransi syariah. Bila dikaji lebih lanjut, dalam mekanisme asuransi syariah terdapat dua akad sekaligus, yakni akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa dualisme akad *tabarru* dengan *tijarah* dalam asuransi syariah di Indonesia tidak sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang asuransi syariah.¹³

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa asuransi di indonesia masih menjadi perdebatan dan menyimpan banyak keraguan didalam masyarakat terutama dalam penggunaan akad asuransi syariah. Prinsip syariah dalam akad

¹¹ Muhammad Syakur, “Kontruksi Akad Asuransi Fatwa DSN-MUI dalam Prespektif Hukum Perjanjian Syariah Kontemporee Musthafa Ahamd AZ-Zarqa”, *Tesis* (Yohyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018), h.3.

¹² Virginia Nur Rahmianti, “ Seputar kajian Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 13 no.2 (2012): h. 162.

¹³ Uswatun Hasanah “Instrument Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah”, *jurnal hukum bisnis islam* 11 no. 2 (2019), h. 454.

syariah masih menjadi keraguan dalam masyarakat apakah akad yang digunakan memang sesuai syariah atau akad dalam asuransi syariah hanya digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan mensyariahkan sesuatu yang tidak bisa disyariahkan. Sehingga penulis menulis sebuah judul skripsi yang berjudul”

kesenjangan akad dalam asuransi syariah di indonesia.

B. Rumusan masalah

Prinsip syariah dalam akad syariah masih menjadi keraguan dalam masyarakat apakah akad yang digunakan memang sesuai syariah atau akad dalam asuransi syariah hanya digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan mensyariahkan sesuatu yang tidak bisa disyariahkan. Berdasarkan masalah yang dikemukakan, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah prinsip akad asuransi syariah?
2. Bagaimanakah perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional?
3. Bagaimanakah pemberlakuan akad dalam asuransi syariah di indonesia?

C. Fokus dan deskripsi fokus

1. Fokus

Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada kesenjangan akad yang terjadi pada asuransi syariah di Indonesia. Yang dimaksud peneliti tentang kesenjangan akad yang terjadi pada asuransi syariah berdasarkan pengamatan, asuransi syariah di Indonesia tidak memisahkan pengelolaan dana *tabarru* dan *tijarah*. Sedangkan secara teoritis skema harus memisahkan kedua akad tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa

dualisme akad *tabarru* dengan *tijarah* dalam asuransi syariah di Indonesia tidak sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang asuransi syariah.

2. Deskripsi Fokus

a. Kesenjangan akad

Kesenjangan akad disini terjadi ketidakseimbangan antara teori dan realita mengenai akad *tabarru'* yang terdapat pada asuransi *takâful* Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana *tabarru'* dan *ujrah*) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana *tabarru'* yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram, dan tentu tidak etis, untuk diambil kembali. Dalam akad *tijarah* terdapat akad *mudharabah*. Transaksi *mudharabah* yang berlangsung di beberapa lembaga asuransi syariah adalah status ganda yang pada satu sisi menempatkan dirinya sebagai pelaku usaha (*mudarib*) dan pada sisi lain sebagai pemilik modal (*sahibul-mal*). Padahal secara riil sejatinya asuransi syariah tidak memiliki modal, sebab modal yang diklaim sebagai milik modal itu sesungguhnya milik nasabah yang disimpan.

b. Asuransi Syariah

Asuransi adalah instuisi ekonomi dimana terjadi perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk mengurangi resiko agar kerugian individu bisa teratas karena asuransi bisa mengganti kerugian, kerusakan dan kehilangan dengan

memberikan penggantian. Asuransi Syariah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dengan berusaha saling melindungi dan tolong menolong dalam kebaikan, yaitu dengan cara saling mengeluarkan dana yang dinilai sebagai nilai ibadah. Karena itu Asuransi ini dikategorikan sebagai kebaikan (tabarru) asuransi ini menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar.

D. Kajian Pustaka

Pokok masalah yang penulis angkat mempunyai relevansi dengan sejumlah teori yang ada dalam jurnal maupun skripsi. Di antara beberapa jurnal dan skripsi yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut.

Abdul Rauf dalam jurnal yang berjudul “*Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer*” dengan kesimpulan bahwa implementasi asuransi syariah belum dikenal di masyarakat karena tidak didapatkan status hukum sehingga sering terjadi perdebatan para ulama..

Kurnia Sari dalam jurnal yang berjudul *Perkembangan Asuransi Kesehatan Swasta Di Indonesia Tahun 2012-2016* dengan kesimpulan asuransi swasta tidak banyak berkembang pada tahun 2012-2016 namun Uang pertanggungan pada asuransi kesehatan dan kecelakaan pada perusahaan asuransi jiwa cenderung naik walaupun sempat turun di tahun 2014.

Arif Efendi, dkk dalam jurnal yang berjudul *Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)* dengan kesimpulan bahwa perusahaan untuk mengelola asuransi dengan basis sistem

syariah belum didukung oleh sebuah regulasi dalam bentuk undang undang tentang asuransi syariah, akan tetapi perkembangannya cukup menggembirakan. Hal ini diantaranya karena adanya dukungan dari Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, meskipun keberadaannya tidak diakui dalam hukum positif di Indonesia.

Eja Armaz Hardi dalam jurnal yang berjudul Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional dengan kesimpulan bahwa Asuransi syariah memiliki tujuan dan prinsip yang sangat berbeda dengan asuransi konvensional, oleh karena itu asuransi syariah diharapkan lebih dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Asuransi syariah juga diharapkan dapat menjangkau masyarakat grass root dengan melakukan inovasi produk yang ringan, mudah dan tepat pada sasaran

Husni Mubarrak dalam jurnal yang berjudul Kontroversi Asuransi Di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs), dengan kesimpulan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2015 yang memunculkan silang pendapat, baik di kalangan elit maupun masyarakat awam di Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai pemberi masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam masalah agama, MUI mempertanyakan keabsahan dan kesesuaian praktik BPJS dengan syariat Islam.

Muhamad Nadrattuzaman Hosen, dalam jurnal yang berjudul Mendudukan status hukum asuransi syariah dalam tinjauan fuqaha kontemporer dengan kesimpulan bahwa asuransi syariah diperbolehkan oleh mayoritas para

ulama yang berdasarkan pada tabarru', namun untuk asuransi tjari tidak diperbolehkan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kullaitatif yang bersifat studi pustaka. Yang menggunakan buku dan jurnal sebagai referensi yang utama. Penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai nilai-nilai pendidikan *tahārah* yang terdapat dalam kitab *Ihyā` Ulūmu ad-Dīn*. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

2. Sumber Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Sumber primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian
- b. Sumber sekunder adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer

3. Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data

kepastakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis . Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku tentang nilai, pendidikan dan *tahārah*. Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis.

4. Tehnik analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana . Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut diseleksi atas dasar reliabilitasnya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisi data berupa analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data. Jadi, sebagai bahan analisis dan komparatif terhadap pemikiran al-Gazali tentang *tahārah* adalah data sekunder, sehingga dapat diketahui makna, kedudukan dan hubungan *tahārah* dengan nilai-nilai pendidikan.

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diantaranya:

- a. untuk mengetahui Prinsip akad dalam asuransi syariah.
- b. untuk mengetahui perbedaan asuransi syariah dan konvensional.
- c. untuk mengetahui Kesenjangan Akad dalam asuransi syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini adalah prinsip syariah dalam akad asuransi syariah
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingann.

G. *Sistematika Pembahasan*

Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi , maka akan diberikan gambaran secara umum.

Penulisan Skripsi Bab I berisi tentang pendahuluan diawali dengan gambaran latar belakang sehingga muncul permasalahan, diikuti dengan pengertian judul dan kajian pustaka. Dalam bab ini diuraikan tujuan dan kegunaan penelitian.

Selanjutnya Bab II menguraikan tentang prinsip akad dalam asuransi syariah yang meliputi: pengertian akad dan jenis-jenis akad dalam asuransi syariah.

Selanjutnya Bab III membahas tentang perbedaan asuransi syariah dan konvensional yang meliputi: pengertian asuransi, pengertian asuransi syariah, perbedaan produk asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Pada Bab IV memuat tentang kesenjangan Akad dalam Asuransi Syariah di Indonesia.

Bab V memuat tentang Penutup, yaitu seluruh rangkaian isi tulisan yang akan diuraikan dalam kesimpulan dan saran-saran kepada semua pihak.

BAB II

PRINSIP AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH

A. *Pengertian Akad*

Menurut bahasa akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian di sebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat *aqad* disebut *uqud*.¹⁴ Sedangkan akad menurut istilah ialah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang di benarkan syara', yang menetapkan keridahan kedua belah pihak.

Definisi lain akad menurut istilah adalah: pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan “berpengaruh pada objek perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).¹⁵

¹⁴Darmawati H, “ Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah” , *Jurnal sulesana* 12 No. 2(2018): h. 144.

¹⁵Darmawati H, “ Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah” , h. 145.

Para fuqaha (ulama fikih) telah membagi istilah akad dalam dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan shara" yang berdampak pada subjek dan objeknya terkait perpindahan barang (Rachmat Syafe'i: 2004, 44).

Akad menurut Zarqa (Rachmat Syafe'i: 2004, 44) bahwa segala yang bersumber/berkaitan atas keinginan seseorang dimana syariat mengatur nilai hak-haknya. Kata-kata Akad memiliki irisan makna dengan Kesepakatan. Namun, kata Akad memiliki makna yang lebih khusus dari kata Kesepakatan itu. Kata Kesepakatan memiliki makna yang lebih umum, sementara akad memiliki makna yang lebih spesifik. Jikalau orang yang sedang melakukan kesepakatan terhadap sesuatu, boleh jadi tidak melakukan akad/kontrak perjanjian. Namun, jikalau orang yang melakukan akad, maka kedua pihak wajib membuat kontrak perjanjian tertulis dan didasari atas saling ridha. Begitupun kata akad jika dibandingkan dengan kata transaksi.¹⁶

Akad merupakan bidang kajian hukum ekonomi Islam atau muamalah. Term akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd*, yang berarti "mengikat, menyambung atau menghubungkan. Secara terminologis hukum Islam, akad

¹⁶ Farid Fathony Ashal, "Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah", *jurnal Human Falah* 3. No. 2 (2016). hal 240.

memiliki beberapa definisi, namun secara prinsip dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan, bahwa akad merupakan pertemuan gaib yang diajukan oleh salah satu pihak
2. dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
3. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁷

Pengertian akad dalam arti luas segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan pengertian khusus ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab – qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.” Contohnya ijab adalah pernyataan seorang penjual “saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “saya serahkan barang ini kepadamu.” Contoh qabul, “saya beli barangmu.” Atau “saya terima barangmu”.¹⁸

¹⁷Urbanus Uma Leu, “Akad dalam transaksi ekonomi syariah”, *jurnal Tahkim* 10 No. 1 (2014): h. 49.

¹⁸ Rosdiana dan Syamsiah, “Áqad dalam Muamalah” *Jurnal Hukum Islam* 1 No. 2 (2019): h.4.

Adapun yang termasuk dalam asas-asas akad sebagai berikut: ¹⁹

a. Asas ibahah

Asas ini dirumuskan dalam kaidah hukum islam “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Maksud kaidah ini adalah bahwa segala tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang larangan tegas atas tindakan itu.

b. Asas kebebasan

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh syara’ dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at.

c. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikat kedua diri dalam suatu perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa suatu akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, misstatement. Pada umumnya suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian konsensualisme ini : misalnya jual beli, tukar menukar, dan sewa menyewa.

d. Asas mengikat

Dalam asas ini mengikat artinya adanya ikatan antara kedua belah pihak dan telah membuat kesepakatan dan wajib di lakukan. Kaidah ushul fiqh

¹⁹ Harun, MH, “*fiqh muamalah*”, (Surakarta:Pt.Santosa,2017), h.33.

disebutkan bahwa “perintah itu pada dasarnya menunjukan wajib. Fungsi asas mengikat yaitu, membangun fondasi bagi konstruksi hukum kontrak yang kokoh, yang menempatkan kedudukan hukum para pihak yang membuat kontrak dalam hubungan-hubungan hukum kontekstual yang setara, jelas dan konkrit.

e. Asas keseimbangan

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Perkembangan asas ini menunjukkan bahwa kebutuhan adanya keseimbangan dan kesetaraan kedudukan merupakan syarat utama terciptanya perjanjian. Perlu adanya pemahaman mengenai berlakunya asas tersebut oleh para pihak dalam perjanjian agar tidak terjadi ketidakabsahan dalam kontrak akibat tidak dipenuhinya kesetaraan dalam membuat kontrak.

f. Asas maslahah

Asas ini merupakan *maqoshidut tasyri'* yang mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalat yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan (kerugiann) atau keadaan yang memberatkan. Manfaat maslahah yang di maksudkan Allah swt. Yang maha bijaksana untuk kepentingan hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

g. Asas amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu

pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra akadnya. Asas amanah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah para pihak wajib melaksanakan akad yang telah dibuatnya sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. Dalam pembahasan hukum perdata, asas ini dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda, yang artinya —perjanjian para pihak harus dipatuhi.

h. Asas keadilan

Asas keadilan digunakan untuk menempatkan para pihak dalam suatu akad berada dalam status yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang serta proporsional. Hal yang serupa ditegaskan dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah mengenai makna asas keadilan itu sendiri yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Hukum Islam kontemporer telah diterima asas bahwa demi keadilan syarat keterbukaan antara pihak terikat dengan akad.

B. Jenis-jenis akad dalam asuransi syariah

Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan diberikan akad, akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.²⁰ Adapun akad-akad yang terdapat dalam asuransi syariah sebagai berikut:²¹

²⁰ Junaidi Abdullah, “ Akad-akad di dalam Asuransi Syariah “, *Jurnal Tawazun: Journal of Shaaria Economic Law* 1 No.1, (2018), h. 18.

²¹Waldi Nopriansyah, “Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang tak terduga”, 67.

1. Akad *Tabarru'*

Konteks akad asuransi syariah, *tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada diantaranya ada yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah niatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.

Akad *tabarru'* telah digunakan pada semua produk Asuransi Takaful Umum sehingga dapat dikatakan bahwa Takaful Indonesia telah menerapkan ketentuan angka 1 bagian pertama dari ketentuan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSNMUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menyatakan bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Muhammad Syakir Sula yang menyatakan bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang mendasari kontrak asuransi syariah.²²

2. Akad *Tijarah (Mudharabah)*

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *mudharabah*. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai

²² Dwi Fidhayanti, "Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah" *Jurnal Hukum dan Syariah* 3 No. 1 (2012), h. 16

pengelola (*Mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan.²³

Akad lain yang digunakan dalam bisnis asuransi syariah adalah akad *mudharabah*. Bentuk akad ini didasarkan prinsip *profit and loss sharing* atau berbagi atas untung dan rugi. Dalam akad ini dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana resiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah. Dalam akad *tijarah (mudharabah)* ini perusahaan asuransi menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Akad *tijarah (mudharabah)* ini hasil keuntungan akan diberikan sesuai dengan akad yang sama-sama dibuat sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan tapi juga peserta mendapatkan perlindungan risiko yang terjadi pada peserta.

3. Akad wakalah *bil ujah*

Wakalah *bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain. Wakalah *bil ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*). Doktor Jafri Khalil, berkaitan dengan fatwa DSN-MUI di atas, menyimpulkan bahwa akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas pada akad *tabarru'*

²³ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah", *Journal of Sharia Economic Law* 1 No. 1 (2018), h. 18.

dan *mudharabah* saja. Beberapa akad tijarah lainnya, seperti *musyarakah*, *wakalah*, *wadiah*, *syirkah* dan sebagainya yang dibenarkan oleh *syara'* untuk digunakan dalam asuransi syariah.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah, objek Wakalah bil Ujah meliputi antara lain: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi.²⁴

C. Prinsip – prinsip dasar asuransi syariah

Adapun prinsip-prinsip dasar asuransi syariah dapat dilihat dibawah ini :

1. Tauhid

Tauhid menurut syariat adalah menyakini keEsaan Allah. Prinsip *tauhid* merupakan hal yang terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syaria'at Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoperasionalkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam mengimplementasikan prinsip tauhid berasuransi jika dilihat dari sisi perusahaan, konsep tauhid dalam beransuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan, atau menangkap peluang pasar yang sedang bergerak positif pada industry yang berbasiskan syariah.

Sisi bertanggung, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong sesama manusia yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata hanya mencari perlindungan apabila terjadi musibah.

²⁴ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah", *Journal of Sharia Economic Law* 1 No. 1 (2018), h. 19.

Dengan demikian, maka nilai tauhid terimplementasikan pada industry asuransi syariah.

Pada prinsip ini asuransi syariah dijalankan dengan dasar muamalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu muamalah yang dapat membawa umat manusia kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu firman Allah di dalam surat Az Zukhruf : 32, yang artinya “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” menjadi dasar dijalankannya asuransi syariah. Muamalah yang dibangun dalam asuransi syariah hendaknya berlandaskan pada surat tersebut. Dengan demikian niat dalam asuransi syariah hendaklah tidak hanya untuk berinvestasi memperoleh keuntungan, akan tetapi lebih luas lagi yaitu memperoleh pahala dari Allah SWT, dengan muamalah yang sesuai ketentuan Allah.²⁵

2. Keadilan

Prinsip keadilan adalah keseimbangan posisi antara peserta dan perusahaan asuransi dimana tidak ada diantara salah satunya memiliki posisi yang lebih tinggi dalam melakukan perjanjian asuransi. Dalam arti lain bahwa nasabah asuransi harus memposisikan diri untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar iuran (premi) kepada perusahaan asuransi dalam jumlah tertentu

²⁵ Teguh Supto, “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 4. No. 2 (2017), h. 134.

kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Prinsip keadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat akad.

Cukuplah bagi kita bahwa Al-quran telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Syaikh al-Qaradhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyanggah kebebasan ekonomi yang berdiri diatas kemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu “keadilan”. Keadilan dalam islam bukanlah prinsip sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang melandasi semua ajaran dan hukum islam berupa akidah, syariah, dan akhlak (moral). Ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan.²⁶

3. Tolong menolong

Tolong menolong antar sesama anggota adalah prinsip dasar dalam melaksanakan Asuransi syariah, karena tolong menolong adalah unsur pembentuk asuransi syariah. Konsep tolong menolong yang terkandung dalam asuransi syariah adalah adanya dana tabarru tersebut (tolong menolong) di antara peserta asuransi untuk menanggung risiko secara bersama-sama atau *sharing of risk*. Jika ada salah satu yang mengalami kecelakaan atau kematian, maka dana tersebut dapat di gunakan untuk membantu peserta yang mengalaminya, atau dalam istilah asuransi disebut dengan klaim. Maka para peserta sudah ridho, jika dana yang terkumpul dihibahkan atau diberikan kepada peserta lain yang mengalami

²⁶ Teguh Suripto, “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 4. No. 2 (2017), h. 135.

kecelakaan. Dalam berasuransi didasari kemauan untuk saling tolong menolong dan saling menghormati antara anggota yang terikat pada akad.

4. Kerjasama

Asuransi syariah juga menjalankan prinsip kerja sama antara nasabah dan perusahaan asuransi selaku pengelola dananya. Kerja sama ini dilakukan sesuai dengan perjanjian/akad yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak, keduanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu *mudarabah* dan *musyarakah*.

5. Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparansi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai syariat islam.

6. Kerelaan

Prinsip kerelaan wajib dimiliki oleh setiap peserta asuransi syariah karena dalam rangka saling melindungi dan tolong menolong antara anggota harus dengan rela memberikan uang (premi) untuk dikumpulkan sebagai dana sosial yang berfungsi untuk membantu anggota yang mengalami kerugian. Prinsip

kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.

7. Larangan riba

Riba adalah penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian tanpa ada ganti/imbalan disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara *bathil*, sebagaimana firman Allah SWT Qs.An-Nisa:4/29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْأُثْمَانِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasulNya, janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil (ilegal). Seperti merampas, mencuri, suapmenyuap, dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan; berlandasan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, dan menyerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah dia mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian.

8. Larangan *maisir*

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan yang bersifat untung-untungan. prinsip larangan *maisir* (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi sebagaimana firman Allah SWT. Qs.Al-Maidah:5/90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahanya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya serta melaksanakan syariatNya, Sesungguhnya khamar (minuman keras), yaitu segala yang memabukkan dan menutup kesadaran akal, dan maisir, yaitu perjudian yang mencakup seluruh jenis taruhan dan lainnya, yang di dalam prakteknya terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan menghalangi mengingat Allah, yaitu batu yang dahulu kaum musyrik melakukan penyembelihan di sisinya sebagai bentuk pengagungan terhadapnya, demi mendekatkan diri kepadanya, dan azlam yaitu anak panah yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka denganya, sebelum bergerak untuk melakukan sesuatu atau mengurungkan niat darinya; sesungguhnya semua itu merupakan perbuatan dosa dan tipu daya yang

di indahkan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa tersebut, semoga kita di beri keberuntungan dan memperoleh surga.

9. Larangan *gharar*

Gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertaruhan atau perjudian. Dalam islam *gharar* merupakan perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak. *Gharar* dalam pandangan ekonomi islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah *profit* (keuntungan) maupun modal yang di bayarkan (premi).²⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

²⁷ Walid Nopriansyah, “asuransi syariah berkah terakhir yang tak terduga”, h.33

BAB III

PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL

A. Asuransi syariah

1. Pengertian asuransi syariah

Asuransi dalam bahasa Arab di sebut *At-ta'nim* yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan rasa aman dan bebas dari rasa takut. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.²⁸ Di Indonesia sendiri, asuransi syariah sering dikenal dengan istilah *takaful*, Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam *muamalah* adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.²⁹

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka I, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'nim, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk

²⁸ Kwat Ismanto, "*Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*", (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2009) h.51

²⁹ Wirdayaningsih, "*Bank dan Asuransi Islam Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2005), h.177.

aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah³⁰

Adapun pandangan Ulama terkait asuransi syariah yaitu mereka mengatakan bahwa munculnya Asuransi Syariah terjadi belum lama ini, pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak praktik asuransi umum atau konvensional. Oleh karena itu Beberapa orang ulama, memberikan pandangan atau pendapatnya tentang asuransi, pendapat atau pandangan tersebut diantaranya Ulama yang berpendapat asuransi dalam segala aspeknya haram termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung oleh kalangan ulama seperti Sayid Sabiq, Abdullah al- Qalqii, Muhammad Yusuf Qordawi dan Muhammad Bakhit al- Muth'i.³¹

Adapun alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi antara lain : Pada dasarnya asuransi itu sama atau serupa dengan judi Asuransi mengandung ketidakpastian. Asuransi mengandung riba Asuransi bersifat *eksploitas* karena premi yang dibayarkan oleh peserta, jika tidak sanggup melanjutkan perjanjian maka premi hangus/ hilang atau dikurangi secara tidak adil (peserta dizalimi) Premi yang diterima oleh perusahaan diputar atau ditanam pada investasi yang mengandung riba / bunga Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar uang dengan tidak tunai. Asuransi menjadikan hidup atau mati seseorang sebagai objek bisnis , yang berarti mendahului takdir Allah. Ulama yang berpendapat membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa dalam

³⁰ Kuat Ismanto, "*Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*", h.52

³¹ Teguh Suropto dan Abdullah Salam, "*Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi*", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* VII, No. 2 (2017), h. 133.

prakteknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama seperti Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abdurrahman isa.³²

Alasan mereka memperbolehkannya adalah: Tidak ada nas Al Quran dan Hadis yang melarang asuransi Ada kesepakatan antara kedua belah pihak Mengandung kepentingan umum (*maslahah*), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek- proyek yang produktif dan untuk pembangunan Asuransi termasuk akad *mudharabah*, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit Pendapatan kedua ini menitikberatkan pada jenis asuransi sosial dan koperasi yang dikelola oleh pemerintah, bertujuan bukan komersial, melainkan lebih pada kemaslahatan umat seperti taspen, Jasa Raharja, dan lain sebagainya.

Ulama yang berpendapat bahwa asuransi bersifat syubhat beralasan karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Bila hukum asuransi dimasukkan dalam hal syubhat, maka kita harus berhati-hati menghadapinya. Kita baru diperbolehkan menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan. Untuk saat ini setelah munculnya asuransi syariah, maka tidak ada lagi istilah syubhat.³³

³² Teguh Suripto dan Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi", h. 130.

³³ Teguh Suripto dan Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* VII, No. 2 (2017), h. 133.

2. Produk-produk Asuransi Syariah

Adapun produk-produk asuransi syariah adalah sebagai berikut :³⁴

- a. Takaful Berencana
- b. Takaful pembiayaan
- c. Takaful pendidikan
- d. Takaful dana haji
- e. Takaful berjangka
- f. Takaful kecelakaan siswa
- g. Takaful kecelakaan diri
- h. Takaful khairat keluarga

Adapun Takaful khairat keluarga terbagi atas beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

- 1) Takaful unsur tabungan diantaranya, takaful dana investasi, takaful dana haji dan takaful dana siswa.
- 2) Takaful tanpa unsur tabungan diantaranya, takaful kesehatan individu, takaful kecelakaan diri individu, takaful al-akhirat individu, takaful wisata dan perjalanan, dan takaful majelis taklim.
- 3) Takaful Umum, diantaranya : takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful kecelakaan, takaful laut dan udara, dan takaful rekayasa.³⁵

³⁴ Walid Nopriansyah, "asuransi syariah berkah terakhir yang tak terduga", h.30.

³⁵ Siti Maskanah, "Implementasi Produk Asuransi Jiwa Syariah terhadap Kestabilan Ekonomi Keluarga", Jurnal Tsarwah 1 No. 2 (2016), h. 120.

3. Landasan hukum asuransi syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rosul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam. Secara tekstual, al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi (*al-ta'min*) secara nyata dalam al-qur'an. Walaupun begitu al-qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.

Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengandung nilai dari asuransi syariah diantaranya: . Qs.Al-Maidah:2

Perintah Allah untuk saling berkerja sama

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْنِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدَّقُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah

sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang kalian diperintahkan-Nya untuk menghormatinya, dan jauhilah larangan-larangan ihram, seperti memakai pakaian yang berjahit, serta hindarilah larangan-larangan tanah haram, seperti berburu binatang. Janganlah kalian melakukan peperangan di bulan-bulan haram (Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab). Janganlah kalian menghalalkan (mengganggu) binatang-binatang hadyu (sembelihan) yang disembelih di tanah suci dengan cara merampasnya atau semacamnya, atau menghalang-halangnya agar tidak sampai ke tempat penyembelihannya.

Janganlah kalian menghalalkan binatang-binatang hadyu yang diberi kalung sebagai tanda bahwa binatang itu adalah binatang hadyu. Dan janganlah kalian menghalalkan (mengganggu) orang-orang yang sedang pergi ke Baitullah yang suci untuk mencari keuntungan dari perdagangan dan mengharap rida Allah. Apabila kalian telah selesai bertahalul dari ihram haji atau umrah, dan telah keluar dari tanah haram, maka berburulah jika kalian mau. Dan jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka telah menghalang-halangi kalian dari Masjidilharam, mendorong kalian untuk berbuat sewenang-wenang dan tidak berlaku adil kepada mereka.

tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakeras hukuman-Nya kepada orang yang durhaka kepada-Nya, maka waspadalah terhadap hukumanNya.

Qs.Al-Baqara:185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemhanya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

“Maksudnya, agama Islam itu ringan dan mudah, baik dalam aqidah, akhlak, amal-amal ibadah, perintah dan larangannya... semuanya ringan dan mudah. Setiap *mukallaf* akan merasa mampu melaksanakannya, tanpa kesulitan dan tanpa merasa terbebani. Aqidah Islam itu ringan, akan diterima oleh akan sehat dan fitrah yang lurus. Kewajiban-kewajiban dalam Islam juga perkara yang sangat mudah”

Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat dengan mudah untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya dimasa yang akan datang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan Allah SWT dalam Al Qur'an memerintahkan hambanya untuk sentiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi.

Qs.Al-Hasyr:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan RasulNya, serta melaksanakan syariatNya, takutlah kalian kepada Allah, waspadalah hukumanNYa dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang Allah larang bagi kalian. Hendaknya setiap jiwa merenungkan apa yang telah dilakukannya berupa amal perbuatan untuk menghadapi Hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kalian kerjakan, tidak ada sedikit pun dari amal kalian yang samar bagi Allah, dan Dia akan membalas kalian karenanya.

Qs.yusuf:46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ ۖ وَسَبْعِ سُتُوبَاتٍ خُضِرٍ ۖ وَآخَرَ
يَبْسُتٍ ۖ لَّعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): “Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.”

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ

Terjemahnya:

kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Terjemahnya:

kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.”

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang luar biasa berharga, dalam peristiwa mimpi raja Mesir yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan sangat akurat sebagai suatu perencanaan negara dalam menghadapi krisis pangan tujuh tahun mendatang. Kisah ini sebagai pelajaran untuk menyiapkan proteksi dari suatu ancaman ekonomi di masa mendatang.

Hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tentang beberapa prinsip bermuamalah, Rasulullah saw bersabda antara lain:

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf). Perintah untuk saling melindungi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang menghilangkan kesulitan diniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat”. (HR. Muslim).

“Sesungguhnya orang yang beriman ialah barang siapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia”. (HR. Ibnu Majah). Hadist tentang menghindari resiko : Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW”. Tentang (untanya):

“Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung bertawakal pada Allah SWT? Bersabda Rasulullah SAW.: Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.” (HR. At-Turmudzi)

Pada dasarnya konsep asuransi adalah konsep pembagian kerugian yang timbul dari kemungkinan kecelakaan tertentu atas nama beberapa individu, daripada beban kecelakaan tersebut harus didera oleh satu orang saja.

Prinsip Asuransi terbangun atas dua unsur:

- a. Unsur Normatif (UU), yang tergambar atas hubungan sah antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, yang dengan hubungan ini, pihak penanggung diwajibkan untuk menanggung segala ancaman bahaya, sejumlah premi ansuran yang telah dibayar oleh pihak tertanggung. Hubungan sah inilah yang kemudian disebut sebagai Akad Asuransi.
- b. Unsur Teknis, yang tergambar dari melaksanakan sebanyak mungkin upaya kompensasi atas sebanyak mungkin ancaman bahaya oleh pihak penanggung sesuai dengan Undang-Undang Statistik.³⁶

4. Ijtihad

Fatwa sahabat Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukum (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar Bin Khattab. Beliau berkata: “orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbangkan untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

Ijma Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqila* ini. *Aqila* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki dari

³⁶ Muhammad Fadhil Junery, “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *jurnal Iqtishaduna* 2 No.1 (2015), h. 126.

si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenangnya). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *ijma* dikalangan sahabat Nabi SAW. Mengenai persoalan ini.

5. Qiyas

Islam memiliki beberapa sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sumber hukum tersebut ialah Qiyas. Qiyas adalah metode *ijtihad* dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal ini yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah/Al-Hadis karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya). Dalam kitab *fathul bari*, disebutkan bahwa dengan datangnya islam sistem *aqila* diterima Rasulullah SAW. Menjadi bagian hukum islam.³⁷

B. Asuransi konvensional

1. Pengertian asuransi konvensional

Kata 'asuransi' berasal dari bahasa Belanda *assuantie*, dan di dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia 'pertanggungan'. Dalam bahasa Arab asuransi di gunakan istila *at-tanim*.³⁸

³⁷ Wirdayaningsih, "Bank dan Asuransi Islam Indonesia", h. 194.

³⁸ Kuat Ismanto, "Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam", h.20

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, yang isinya :

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan .

Definisi asuransi yang substansinya adalah kontrak beberapa peserta selaku tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung yang berkeinginan untuk beri ganti rugi ketika mengalami suatu musibah, dengan terjadinya pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung, maka tertanggung diwajibkan untuk membayar premi berupa uang kepada perusahaan asuransi.³⁹

Dalam asuransi konvensional selama ini dikenal dengan konsep pemindahan resiko (*transfer of risk*) dari peserta kepada peserta lain. Resiko dalam asuransi konvensional dibagi menjadi tiga yaitu resiko murni, spekulatif dan individu. Dengan kata lain bahwa besaran premi yang harus dibayar oleh seorang pemegang asuransi dilihat dari besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini tidak dikenal pada asuransi syariah yang berkembang

³⁹ Eja Armaz Hardi, “Studi komparatif Takaful dan Asuransi Konvensional”, *Jurnal bisnis dan manajemen islam* 3 No.2 (2015), h. 425.

saat ini. Selajutnya asuransi konvensional diperbolehkan melakukan investasi dari dana peserta pada sektor apapun, baik sektor halal ataupun haram. Juga banyak akademisi ekonomi syariah meng-klaim bahwa kontrak asuransi konvensional banyak mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam seperti masih adanya gharar, maisir, riba.

Terjadinya gharar dalam asuransi konvensional adalah peserta bertanggung tidak mengetahui kapan ia akan tertimpa musibah dimasa yang akan datang, yang mana otoritas ini hanya terdapat pada Allah SWT. Ketidak jelasan inilah yang dijual oleh perusahaan asuransi kepada peserta bertanggung⁴⁰

2. Jenis-jenis asuransi konvensional

- a. Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yng dipertanggungan.
- c. Re-asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.⁴¹

⁴⁰ Eja Armaz Hardi, "Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3. No. 2 (2015), h. 426.

⁴¹ Kuat Ismanto, "Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam", h.35.

3. Landasan hukum asuransi konvensional

Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara modus operandumnya di dasarkan hukum positif. Karena itu, tidak memiliki sumber hukum yang jelas, maka cenderung membuat transaksi yang tidak memiliki kepastian dan kejelasan kedepan. Seperti halnya dalam akad *ma'qud* alaih (sesuatu yang diakadkan) terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*gharar*) berapa yang akan dibayar beserta asuransi yang meliputi berapa sesuatu yang akan diperbolehkan (ada atau tidak, besar atau kecil), tidak diketahui berapa lama seseorang beserta asuransi yang membayarkan.⁴²

C. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

1. Perbedaan dari segi konsep asuransi syariah dan konvensional

Adapun perbedaan dari segi konsep asuransi syariah adalah sebagai berikut:

a. Asuransi syariah

Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*.

b. Asuransi konvensional

Penjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.

⁴² Nur Azizah Latifah dan Rofifa Dhia 'athifa, "Asuransi Syariah Vs Asuransi Konvensional", *jurnal islamika* 19 No.1 (2019), h. 96.

2. Perbedaan asal usul asuransi syariah dan konvensional

Adapun perbedaan dari segi asal usul asuransi syariah dan konvensional adalah sebagai berikut :

a. Asuransi syariah

Kebiasaan suku arab jauh sebelum islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum islam, bahkan telah tertuang dalam konsitusi pertama di dinua (konssitusi madina) yang di buat langsung Rasulullah.

b. Asuransi konvensional

Masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan per-janjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di *Coffe House London* berdirilah *Lloyd of London* sebagai cikal bakal asuransi konvensional.

3. Perbedaan sumber hukum asuransi konvensional dan asuransi syariah

a. Asuransi syariah

Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah islam adalah Al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan Rasul, *Ijma'*, Fatwa sahabat , *Qiyas*, *Istihsan*, 'Urf' tradisi', dan *Mashalih Mursalah*.

b. Asuransi konvensional

Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, hukum alam, dan contoh sebelumnya.

4. Perbedaan “Maghrib” (*maisir, gharar, dan riba*)

a. Asuransi syariah

Bersih dari adanya praktik *maisir, gharar* dan *riba*.

b. Asuransi konvensional

Tidak selaras dengan syariah islam karena adanya *maisir, gharar* dan *riba*; hal yang di haramkan muamalah.

5. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional dalam DPS (Dewan Pengawas Syariah)

a. Asuransi syariah

Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaa operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Asuransi konvensional

Tidak ada, sehingga dalamnya banyak praktik yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah.

6. Perbedaan akad asuransi syariah dan konvensional

a. Asuransi syariah

Akad *tabarru'* dan akad *tijarah* (*mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah*, dan lain-lain).

b. Asuransi konvensional

Akad jual beli (akad *mu'awadhah*, *akad idz'aan*, akad *gharar*, dan akad *mulzim*).

7. Perbedaan risiko (jaminan) asuransi syariah dan asuransi konvensional

a. Asuransi syariah

Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya.

b. Asuransi konvensional

Transfer of risk, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.

8. Perbedaan pengelolaan dana asuransi syariah dan asuransi konvensional

a. Asuransi syariah

Produk-produk *saving life* terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabbaru'* 'derma' dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hagus. Sedangkan untuk term *insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat tabarru'.

b. Asuransi konvensional

Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hagus (untuk produk *saving life*).

9. Perbedaan investasi asuransi syariah dan asuransi konvensional

a. Asuransi syariah

Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang dilarang.

b. Asuransi konvensional

Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.

10. Perbedaan kepemilikan dana asuransi syariah dan asuransi konvensional

a. Asuransi syariah

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shohibulmal*), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut.

b. Asuransi konvensional

Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana *insurance*.

11. Perbedaan unsur premi asuransi syariah dan asuransi konvensional

a. Asuransi syariah

Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tak mengandung unsur riba). *Tabarru'* juga dihitung dari table mortalitas, tapi tanpa perhitungan bunga teknik.

b. Asuransi konvensional

Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas (mortality tables), bunga (intereset), biasa asuransi (cost of insurance).

12. Perbedaan *Loading* asuransi syariah dan konvensional

a. Asuransi syariah

Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.

b. Asuransi konvensional

Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bias menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hagus).

13. Perbedaan sumber pembayaran klaim asuransi syariah dan konvensional

a. Asuransi syariah

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.

b. Asuransi konvensional

Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.

14. Perbedaan asistem akuntansi asuransi syariah dan konvensional

a. Asuransi syariah

Menurut konsep akuntansi *cash basis*, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan *accrual basis* dianggap bertentangan dengan dengan syariah karena mengakui adanya pendapat, harta beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar terjadi hanya Allah yang maha tau.

b. Asuransi konvensional

Menganut konsep akuntansi *accrual basis*, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan asset, *expenses*, *liabilities* dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.

15. Perbedaan keuntungan (profit) asuransi syariah dan konvensional

a. Asuransi syariah

Profit yang diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta.

b. Asuransi konvensional

Keuntungan yang diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.

16. Perbedaan misi dan visi asuransi syariah dan asuransi konvensional

a. Asuransi konvensional

Misi yang diemban dalam syariah adalah misi akidah, misi ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat (social).

b. Asuransi konvensional

Secara garis besar misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.⁴³



⁴³ Wirdayaningsih, “*Bank dan Asuransi Islam Indonesia*”, h.186.

BAB IV

PEMBERLAKUAN AKAD ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

A. *Pemberlakuan Akad Tabarru Dalam Asuransi Syariah*

Akad adalah kata serapan dari Pemberlakuan Akad Tabarru Dalam Asuransi Syariah bahasa Arab, yaitu : عقد, yaitu ikatan atau janji. Akad dapat juga diartikan sebagai kontrak perjanjian. Kata akad sudah menjadi hal yang sangat mudah dipahami bagi orang Indonesia. Akad dapat dipahami sebagai ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang didasari atas keyakinan dan kepercayaan antara keduanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Akad juga dapat dipahami sebagai tali pengikat atas objek tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Menurut fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah, "Akad tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial." Dengan demikian asuransi syariah berbasis tabarru' digagas untuk menjawab pertanyaan di atas. Konsep muamalah berbasis tabarru' adalah ibadah, sehingga akadnya dikategorikan sebagai nonprofit oriented. Dengan mempertimbangkan aspek ini semata, maka tidak ada sesuatupun yang perlu diperdebatkan mengenai keabsahannya.⁴⁴

Prinsip tabarru' adalah bentuk muamalah yang berorientasi kebajikan, sehingga bisa dipastikan semua ulama tidak akan mempersoalkan aspek ini.

⁴⁴ Fachrul Fuadi, "Analisis Akad Tabarru' Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syari'ah Kediri", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 29. No. 2(2018). h . 347

Industri asuransi syariah di Indonesia dalam hal ini berpegang pada Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhâmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Menurut fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006, tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil.⁴⁵ Akad tersebut merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad tabarru' sekurang-kurangnya menyebutkan: 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu; 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok; 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Setiap peserta dalam asuransi syariah sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan lainnya, sesuai keputusan fatwa ketiga No. 53/DSN-MUI/III/ 2006. Upaya tersebut dikoordinir oleh pengelola, dalam hal ini PT asuransi, dengan menyisihkan dan memisahkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut (premi) tabarru'. Dengan demikian sistem ini tidak menggunakan metode pengalihan risiko di mana tertanggung harus membayar premi sebagaimana terdapat dalam sistem asuransi konvensional. Sistem yang

⁴⁵ Nafis ikhrami, "Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17. No. 2 (2017). h. 265.

berlaku dalam asuransi syariah adalah lebih tepat disebut sebagai pembagian risiko di mana peserta saling menanggung (takaful). Bila melihat dari segi tujuan maka tentu saja dapat dibenarkan oleh ajaran Islam, bahkan dianjurkan.

Metode takâful tersebut akan meringankan penderitaan seseorang, yaitu dengan jaminan keselamatan kerja, askes, pensiun hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad tabarru' pada usaha asuransi syariah. Pengelolaan dana tabarru' harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu: (1) pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya; (2) hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'; (3) dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudarabah atau akad mudarabah mushtarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah.⁴⁶

Implikasi pemahaman Fatwa No. 53 di atas menunjukkan bahwa dana tabarru' dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling menolong antara sesama nasabah, sehingga tidak boleh menjadi dana tijarah. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah dasar yang berlaku pada akad-akad tabarru' adalah larangan untuk mengubah kebaikan menjadi berorientasi tijarah; yaitu mencari keuntungan atau profit. Dengan kata lain, akad yang telah disepakati sebagai tabarru' tidak boleh dirubah atau berganti menjadi akad tijarah.⁴⁷

Dalam kasus asuransi, secara sederhana dapat dikatakan, peserta yang telah berniat di awal untuk menolong sesama anggota yang terkena musibah atau sedang menghadapi risiko, tidak boleh mencari keuntungan dari pemberiannya

⁴⁶ Dwi Fidhayanti. "Pelaksanaan Akad Tabarru, Pada Asuransi Syariah" *jurnal hukum dan syariah* 3. No. 1(2012). h . 18.

⁴⁷ Nafis ikhrami, "Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17. No. 2 (2017). h. 265.

tersebut. Berdasarkan prinsip non-profit oriented di atas, maka dapat ditarik kesimpulan turunan bahwa pembicaraan tentang gharar, maysir, muqamarah, dan sebagainya menjadi tidak relevan dalam kajian tentang akad tabarru' asuransi syariah. Hal ini bisa dipahami mengingat tabarru' adalah akad "satu arah", yakni tidak mensyaratkan adanya persetujuan atau kerelaan dari pihak penerima.

Unsur-unsur ketidakpastian, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya hanya menjadi persoalan dalam akad-akad berbasis keuntungan (tijarah). Oleh karena itu, peserta asuransi syariah yang tidak menerima klaim mestinya tidak menganggap preminya sebagai "dana hangus," mengingat mereka sejak awal berniat untuk ber-tabarru', bukan berspekulasi dan "barter" risiko dengan perusahaan takaful.

Ketentuan mengenai ketidakpastian karena risiko tersebut berbeda untuk akad tabarru'. Dalam akad ini tidak disyaratkan adanya "kepastian" dalam waktu pembayaran, jumlah pembayaran, dan obyek yang ditransaksikan. Berdasarkan sifatnya, akad tabarru' yang mengandung unsur ketidakjelasan tidak menjadikan akad itu rusak (fasid) sebagaimana jika akad tersebut bersifat tabadulli. Demikian halnya dengan ketidakjelasan nilai barang yang menjadi objek tabarru', tidak akan menjadikan akad itu fasid sebagaimana terjadi dalam akad jual beli.

Kondisi ini menjadikan seseorang yang mendapatkan manfaatpun tidak menjadi syarat, apakah harus ada kepastian terkena musibah atau tidak ada kepastian. Dengan demikian tidak menjadikan akad tabarru' mengandung gharar, sebagaimana jika terjadi di akad tabaduli. Untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan hal-hal tersebut, maka alternatif solusi yang dapat dipakai adalah mekanisme kesepakatan para peserta asuransi.

Kesepakatan mengenai hal-hal teknis tersebut dapat dinilai sebagai suatu janji (*wa'ad*). Konsep muamalah membedakan akad dengan *wa'ad*. *Wa'ad* adalah

janji antara satu pihak kepada pihak lainnya. Janji ini mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang berjanji. Ia berkewajiban untuk melaksanakan janjinya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga pihak yang tidak memenuhi janjinya hanya akan menerima sanksi moral saja tanpa ada sanksi hukum.

Prinsip yang berlaku untuk akad tabarru' di atas tidak dapat diterapkan untuk jenis-jenis akad tijarah. Artinya, akad-akad yang ketika sighat akad dimaksudkan untuk tujuan mencari keuntungan (tijarah), boleh dirubah menjadi akad tabarru'. Bahkan al-Qur'an mengajarkan agar para pebisnis memberi kelonggaran kepada rekan bisnis yang mengalami kesulitan. Islam tidak mengajarkan prinsip "*the business of business is business*," namun "*the business of business is mercy*."⁴⁸

Asuransi takaful tidak akan memiliki masalah fikih apabila akad yang dipakai hanya akad tabarru'. Apabila prinsip tabarru' ini diterapkan secara tunggal dalam akad asuransi syariah maka para ulama tidak perlu lagi membicarakan unsur-unsur gharar, jahalah, riba, spekulasi (muqamarah), tadlis, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tidak relevan dalam akad-akad nonprofit oriented yang tidak mensyaratkan adanya tabadduly dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, persoalan yang menjadi diskusi penting adalah mengenai "pencampuran" antara akad tabarru' dengan tijarah dalam asuransi syariah.⁴⁹

⁴⁸ Nafis ikhrami, "Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17. No. 2 (2017). h. 267.

⁴⁹ Nafis ikhrami, "Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17. No. 2 (2017). h. 267.

B. Pemberlakuan Akad Tijarah Dalam Asuransi Syariah

Selain tabarru', produk-produk asuransi syariah kontemporer di Indonesia juga menggunakan model akad tijarah. Model perjanjian yang kedua ini sesungguhnya merupakan upaya yang bersifat komersil untuk mendapatkan profit. Model perjanjian kedua yang diperkenalkan oleh industri asuransi syariah di Indonesia ini tentu juga harus berpijak kepada spririt syariah sebagai sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.

Dalam hal ini fatwa kedua No. 21 DSN-MUI membatasi jenis akad tijarah dalam takaful adalah mudharabah. Ketentuan tersebut kemudian diperinci dalam fatwa NO:51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyaraka pada asuransi syariah. Berdasarkan kajian muamalah, penggunaan akad tijarah (tujuan keuntungan) untuk transaksi yang bersifat tabaddul memiliki konsekuensi sebagai berikut: (1) harus ditentukan tentang pembayaran, salah satunya yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; dan (2) obyek yang diakadkan harus ditentukan barangnya (misalnya dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus jelas).

Transaksi yang menyalahi salah satu dari unsur tersebut akan mengakibatkan akad menjadi batil. Oleh karena itu, akad dinilai batal secara hukum karena akad tabaddul mensyaratkan adanya "kepastian" dan kerelaan bagi semua pihak. Dengan demikian, tidak ada satu pihak yang dirugikan, dan sebaliknya, tidak ada pihak lain yang mengambil keuntungan secara batil atau zalim. Realitas transaksi yang berlangsung antar lembaga asuransi syariah di

Indonesia dengan para nasabahnya telah menempatkan kedudukan asuransi syariah sebagai subjek hukum untuk bertindak sebagai pihak yang memiliki kecakapan bertindak.

Pada sisi lain, ketika asuransi syariah berkedudukan sebagai penyalur dana kepada nasabah yang membutuhkan dana misalnya untuk kepentingan modal usaha atau untuk kepentingan lainnya, maka pihak asuransi berkedudukan sebagai pihak yang memberikan bantuan dana. Di sinilah kemudian lembaga asuransi “dianggap” menempati posisi sebagai *sahibal-mal*. Padahal penyimpanan dana yang sesungguhnya adalah nasabah. Lembaga asuransi syariah merupakan pihak penyalur dana yang tersimpan.

Perseroan dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga harus ada ijab dan kabul dari para pihak (perseronya). Dengan demikian, dalam perserikatan itu harus ada salah satu pihak yang mengajukan penawaran kepada pihak lainnya untuk melakukan suatu kerja sama usaha berbasis *profit and loss sharing*.

Kritik selanjutnya terhadap transaksi *mudarabah* yang berlangsung di beberapa lembaga asuransi syariah, adalah status ganda yang dimiliki asuransi syariah, yang pada satu sisi menempatkan dirinya sebagai pelaku usaha (*mudarib*) dan pada sisi lain sebagai pemilik modal (*sahibal-mal*). Padahal secara riil sejatinya asuransi syariah tidak memiliki modal, sebab modal yang diklaim sebagai milik modal itu sesungguhnya milik nasabah yang disimpan.

“Skenario” status ganda asuransi syariah adalah lembaga menghimpun

dana dari peserta pertama dengan akad mudarabah (di samping akad tabarru'). Dalam hal ini asuransi memposisikan peserta sebagai pemilik modal dan asuransi syariah sendiri mengklaim sebagai pelaku usahanya (mudarib). Ketika modal sudah dalam penguasaan, maka perusahaan tidak menjalankan dengan amanah yang semestinya dilakukan sebagai pelaku usaha dalam akad mudarabah. Setelah memegang modal, perusahaan kembali mengikatkan diri dengan perjanjian “baru” kepada pihak lain. Dalam konteks kedua ini perusahaan menempati posisi sebagai sahibal-mal, sedangkan pihak lain adalah mudarib.

Menyimak skema di atas, maka dapat diketahui terdapat dua akad mudarabah yang dilakukan asuransi syariah tersebut, yaitu akad mudhrabah dengan nasabah pertama ketika asuransi memposisikan diri sebagai pelaku usaha dan akad mudrabah dengan pihak ketiga ketika asuransi kemudian memposisikan diri sebagai pemilik modal. Apabila perusahaan asuransi melakukan perikatan mudarabah dengan pihak lain atas ijin pemilik modal awal, maka mereka tidak berhak atas bagian keuntungan usaha.

Hal ini karena statusnya hanya sebagai perantara atau makelar saja. Berdasarkan prinsip mudarabah, PLS hanya dimiliki oleh pemodal dan pelaku usaha. Pihak-pihak lain yang tidak memiliki modal dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha tidak berhak mendapatkan proporsi bagi hasil. Praktek mudarabah “berantai” sebagaimana dipraktekkan asuransi syariah maupun lembaga keuangan syari'ah lainnya saat ini sebenarnya tidak dapat dibenarkan.

Pihak asuransi yang dalam status pertama sebagai pelaku usaha dan menerima modal dari nasabah pertama (diasumsikan sebagai kreditur) kemudian

tidak amanah untuk menjalankan perannya sebagai pelaku usaha. Perusahaan asuransi justru menyalurkan kembali dana pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak lain yang hendak berlaku sebagai pelaku usaha. Jadi substansi dari mudarabah pada asuransi ini sesungguhnya adalah upaya menyalurkan dana terhimpun kepada pihak ketiga.

Posisi asuransi adalah mediator. Perusahaan pada hakekatnya tidak pernah bersentuhan dengan sektor riil. Ia hanya menerima dan menyalurkan kembali dana serta mengambil keuntungan atasnya. Realitas ini menyerupai yang terjadi pada asuransi konvensional yang mencari profit dengan bunga maupun dengan “spekulasi”. Perolehan keuntungan dari bunga dan spekulasi itu terputus dari sektor riil.

Ketentuan dasar dalam mudarabah, sebagaimana diatur dalam fatwa No. 51/DSN-MUI/ III/2006, mensyaratkan seluruh modal diserahkan atau menjadi berada dalam kekuasaan mudarib pada saat akad disepakati. Dengan demikian, tidak boleh ada sebagian modal yang diutang atau diserahkan kemudian. Aktivitas bisnis yang diakadkan itu hanya akan berlangsung ketika seluruh modal diserahkan kepada mudarib. Konsep ini jelas tidak dapat dilakukan dalam akad asuransi, sebab “modal” yang diserahkan kepada pihak pengelola diserahkan secara berkala ketika peserta membayar premi.

Dalam akad mudarabah yang sesungguhnya, hak pengelolaan atas kegiatan shirkah hanya dimiliki oleh mudarib. Ia berhak menjalankan shirkah itu sesuai dengan keahlian, pandangan dan pendapatnya sendiri. Pemodal tidak memiliki hak atas pengelolaan shirkah itu. Sebab, akad mudarabah itu terjadi atas badan

pengelola dan harta pemodal, bukan atas badan pemodal. Dengan demikian, pemodal menjadi “orang asing” dari shirkah itu, sehingga ia tidak boleh melakukan campur tangan atas pengelolaan shirkah tersebut. Meski demikian, pemodal boleh menetapkan syarat-syarat atas pengelolaan shirkah itu pada saat akad dibuat. Dalam hal ini, mudarib terikat kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁵⁰

C. PANDANGAN ULAMA TENTANG ASURANSI SYARIAH

Munculnya Asuransi Syariah terjadi belum lama ini, pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak praktik asuransi umum atau konvensional. Oleh karena itu Beberapa orang ulama, memberikan pandangan atau pendapatnya tentang asuransi, pendapat atau pandangan tersebut diantaranya : (Muhamad Thoin, Anik, 2015 : 7 – 8). Ulama yang berpendapat asuransi dalam segala aspeknya haram termasuk asuransi jiwa.

Pendapat ini didukung oleh kalangan ulama seperti Sayid Sabiq, Abdullah al- Qalqii, Muhammad Yusuf Qordawi dan Muhammad Bakhit al- Muth'i. Adapun alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi antara lain : Pada dasarnya asuransi itu sama atau serupa dengan judi Asuransi mengandung ketidakpastian Asuransi mengandung riba.

Ulama yang berpendapat membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa dalam prakteknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama seperti Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan

⁵⁰ Nafis Irkhami. “problematika akad ganda tabarru’ dan tijarah dalam industri asuransi syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 3. No. 8(2015). h. 11.

Abdurrahman isa. Alasan mereka memperbolehkannya adalah: Tidak ada nas Al Quran dan Hadis yang melarang asuransi Ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengandung kepentingan umum (masalah), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek- proyek yang produktif dan untuk pembangunan.

Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharin. Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta'awwuniah) Diqiyaskan (analogi) dengan system pension. Ulama yang berpendapat bahwa asuransi bersifat syubhat beralasan karena ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Bila hukum asuransi dimasukkan dalam hal syubhat, maka kita harus berhati-hati menghadapinya.⁵¹

⁵¹ Teguh Suropto, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 4 No.2. (2027). h. 133.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Akad adalah perjanjian, perikatan antara dua pihak atau lebih dengan menetapkan keridhaan diantara kedua belah pihak. Akad dalam asuransi syariah ada 2 akad tijarah dan tabarru'. Akad tabarru' adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan (*Non for Profit Transaction*) akad tijarah adalah transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis (*For Profit Transaction*).
2. Asuransi Syariah Adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, Dijalankan dengan prinsip *sharing of risk*, yaitu risiko dari satu peserta akan dibebankan kepada seluruh peserta yang menjadi pemegang polis. dan asuransi konvensional adalah produk asuransi dengan prinsip jual-beli risiko. Jadi, premi asuransi tersebut sebenarnya dibayarkan untuk membeli risiko yang terjadi. Baik dari sisi perusahaan maupun nasabah.

Dijalankan dengan prinsip *transfer of risk*, yaitu risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi karena berdasarkan prinsip pertukaran (jual beli).

3. Pemberlakuan akad dalam asuransi syariah di Indonesia didalamnya terdapat dua akad yaitu tabarru' dan tijarah. Akad tabarru' digunakan dengan tujuan untuk kebajikan (tolong-menolong). Sedangkan akad tijarah digunakan dengan tujuan komersial (mendapatkan keuntungan). Dalam akad tijarah terdapat akad mudharabah. Transaksi mudharabah yang berlangsung di beberapa lembaga asuransi syariah adalah status ganda yang pada satu sisi menempatkan dirinya sebagai pelaku usaha (mudharib) dan pada sisi lain sebagai pemilik modal (sahibul-mal). Padahal secara riil sejatinya asuransi syariah tidak memiliki modal, sebab modal yang diklaim sebagai milik modal itu sesungguhnya milik nasabah yang disimpan. Inilah yang menjadi pertentangan dalam asuransi syariah di Indonesia. Namun, sebagian Ulama berpendapat bahwa asuransi syariah bersifat syubhat karena ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan dan menghalalkannya.

B. Saran

1. Bagi perusahaan asuransi syariah perlu mengkaji lebih dalam mengenai akad-akad yang digunakan dalam asuransi Syariah di Indonesia yang digunakan sekarang, agar akad yang digunakan tidak bersifat syubhat.

2. Bagi pengguna jasa asuransi peneliti menyarankan untuk menata niatnya agar mengikuti Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kontribusi dari musibah yang akan dialami, melainkan juga menata niat untuk tolong – menolong antar sesama umat Islam. Dengan demikian selain mendapatkan dana pertanggungjawaban yang dikehendaki, kegiatan tersebut juga bernilai ibadah.
3. Bagi para peneliti diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda ataupun hal-hal lain yang lebih perlu lagi diteliti mengenai Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Rebuglik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.106
- Abdullah, Juanidi. “ Akad-akad di dalam Asuransi Syariah “. *Jurnal Tawazun: Journal of Shaaria Economic Law* 1 No.1, (2018), h. 18.
- Armaz Hardi, Armaz Eja.” Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 3 no 2 (2015): h. 424.
- Darmawati H. “ Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah”. *Jurnal sulesana* 12 no. 2(2018): h. 144.
- Dhia Rofiffa dan Latifah Azizah Nur. “Asuransi Syariah Vs Asuransi Konvensional”, *jurnal islamika* 19 no.1 (2019), h. 96.
- Efendi, Arif. “Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)”. *Wahana Akademika* 3 No. 2 (2016): h. 73.
- Hakim, Arif M. “Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus”. *Jurnal Muqtasid* 3 no.2 (2012): h. 237.
- Hardi, Armaz Eja “Studi komparatif Takaful dan Asuransi Konvensional”, *Jurnal bisnis dan manajemen islam* 3 no.2 (2015), h. 425.
- Harun, MH. “*fiqh muamalah*”. Surakarta:Pt.Santosa. 2017
- Hosen, Nadrattuzaman Muhamad. “Mendudukan status hukum asuransi syariah dalam tinjauan fuqaha kontemporer”. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13 no. 2 (2013): h. 213.
- Ismanto, Kwat. “*Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*”. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. 2009.
- Junery, fadhil Muhammad “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam”. *jurnal Iqtishaduna* 2 no.1 (2015), h. 126.
- Khozin, M. “Prinsip Pemikiran Asuransi Islam”, *Jurnal Ilmiah Keislaman* 7 No. 2 (2008): h. 189.
- Leu, Uma Urbanus. “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Tahkim* 10 no. 1 (2014)
- Maskanah, Siti. “Implementasi Produk Asuransi Jiwa Syariah terhadap Kestabilan Ekonomi Keluarga”. *Jurnal Tsarwah* 1 No. 2 (2016), h. 120.

- Mubarrak, Husni. "Kontroversi Asuransi Di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)". *Jurnal Peradaban Islam* 12 No.1 (2016): h. 35.
- Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1 No.1 (2015): h. 79.
- Fuadi, Fachrul "Analisis Akad Tabarru' Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syaria'ah Kediri", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 29. No. 2(2018). h. 347
- Nafis Ikhlami, Nafis "Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17. No. 2 (2017). h. 271.
- Puspitasari, Novi. "Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional". *Jeam* 10 no. 1 (2011): h. 35.
- Rauf, Abdul. "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer". *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum* 1 no.2 (2010): h. 141.
- Rosdiana dan Syamsiah. "Akad dalam Muamalah" *Jurnal Hukum Islam* 1 no. 2 (2019).
- Salam, Abdullah dan Suropto Teguh "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* VII, No. 2 (2017), h. 133.
- Sari, Kurnia. "Perkembangan Asuransi Kesehatan Swasta Di Indonesia Tahun 2012-2016". *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia* 2 No, 2 (2016): H. 48.
- Sula, Syakir Muhammad *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani. 2011. Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung: Perpustakaan Nasional. 2008.
- Sunarmi. "Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya". *Jurnal Ilmu Hukum* 3 No. 1 (2015): h. 5.
- Thohari, Fuad. "Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah". *Al-Iqtishad* 3 No.2 (2011): h. 274.
- Wirdyaningsih. "*Bank dan Asuransi Islam Indonesia*". Jakarta: Kencana. 2005.
- Suropto, Teguh. "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 4 No.2. (2027). h. 133.
- Fidhayanti, Dwi. "Pelaksanaan Akad Tabarru, Pada Asuransi Syariah" *jurnal hukum dan syariah* 3. No. 1(2012). h. 18.

Irkhami, Ikhrami. “problematika akad ganda tabarru’ dan tijarah dalam industri asuransi syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 3. No. 8(2015). h. 11.



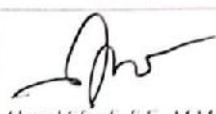
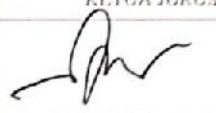
LAMPIRAN

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

EKONOMI ISLAM

Kampus I Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Sit. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa
Tlp. 424835 Fax. 424836

Hal : Persetujuan Judul Skripsi dan Pembimbing

JUDUL SKRIPSI	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI KETUA JURUSAN
Analisis Indikasi gharar dalam transaksi Ekonomi (Studi Kasus Pada Kibangan Pedagang Remping Korp. Selayar)	2020 31/1	 Ahmad Efendi, S.E., M.M. NIP. 197510152005021001
PEMBIMBING	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI KETUA JURUSAN
1. Prof Abustani Ilyas.	2020 31/1	 Ahmad Efendi, S.E., M.M. NIP. 197510152005021001
2. Akram nnes		



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 345 Tahun 2020

TENTANG

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar sebagai :

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Fifi Kusma Sari**, Nim: 90100116055 tertanggal 4 Februari 2020 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "ANALISIS INDIKASI GHARAR DALAM TRANS AKSI EKONOMI (STUDI KASUS PADA TIMBANGAN PEDANG EMPING KEP.SELAYAR)"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan c. pandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendidikan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag
2. Akramunnas, SE., MM.
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 10 Februari 2020

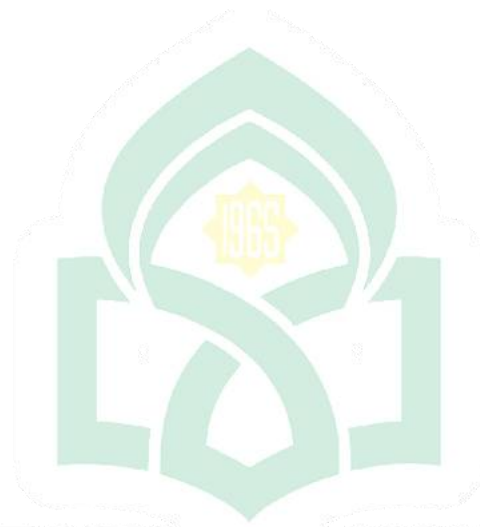
Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag
NIP. 19661130 199303 1 003

RIWAYAT HIDUP



Fifit Kusma Sari, lahir di Benteng Selayar Kelurahan Benteng utara Kecamatan Benteng, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13, Agustus , 1998. Dia lahir dari pasangan yang bernama Bapak Ahmad Saleh dan Ibu Murniati. Dia anak kedua dari empat bersaudara . Memulai Pendidikan di sekolah dasar pada tahun 2005 di SD Inpres benteng dua Kep. Selayar, kemudian pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Benteng Selayar. Setelah lulus, dia melanjutkan Sekolah kejuruan atas di SMK Negeri 1 Benteng Selayar .

Pada tahun 2016, dia melanjutkan pendidikannya untuk meraih gelar Strata 1 (S1) di salah satu universitas Negeri yang ada di Makassar yaitu UIN Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama di kampus ia berproses di kampus tersebut, ia bergabung dalam salah satu organisasi yang ada di kampus yaitu UKM Pencak silat . Setelah 4 tahun berproses di kampus akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan S1 dan melalui banyak drama dalam proses menyusun skripsi tetapi Alhamdulillah bisa di lewati, dan pada akhirnya happy ending.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R